

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
2019 - 2023**



**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
PELAIHARI  
2019**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR : .....	
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN	
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 – 2018 .....	iv
 BAB I. PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	5
D. Sistematika .....	6
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN Dinas Kesehatan .....	 7
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD .....	7
B. Sumber Daya Kesehatan .....	18
C. Kinerja Pelayanan SKPD .....	22
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	23
 BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	 27
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	27
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	31
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kab/ Kota .....	32
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	33
E. Penentuan Isu-isu Strategis .....	34
 BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	 35
A. Tujuan .....	35
B. Sasaran .....	35

BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	.....	37
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	.....	42
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	.....	44
BAB VIII	PENUTUP	.....	46
	LAMPIRAN		

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2019-2023

Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan kabupaten Tanah Laut untuk kurun waktu 2019 - 2023, dengan menekankan pada pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas pembangunan bidang kesehatan Pusat dan Provinsi

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini kami mengajak kepada semua unsur Dinas Kesehatan untuk saling bekerja sama dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut ini guna mewujudkan visi Kabupaten Tanah Laut "Terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi" (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi)

Semoga upaya kita mendapat Rahmad, Hidayah dan Ridha Nya. Aamiin.

Pelaihari, 22 April 2019

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut



**HJ. Nina Sandra, SKM, M.M**  
**NIP 196407101985112023**



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 188.45/ 796 -KUM/2019**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2019 - 2023**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah di bidang kesehatan perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan ;
  - b. bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang membuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2019 - 2023,
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Penguasaan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

#### **MEMUTUSKAN :**

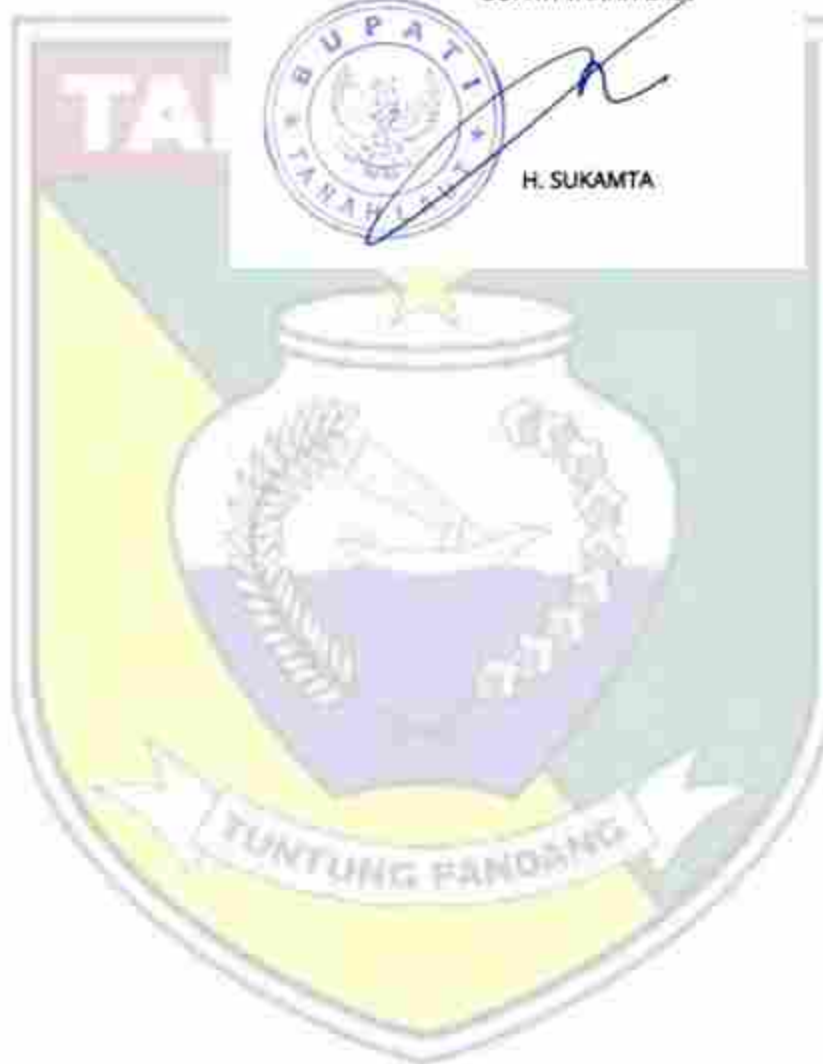
Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019 - 2023.

- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA agar dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI TANAH LAUT







## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan adalah bagian dari pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan diciptakan Visi Kabupaten Tanah Laut yang merupakan cerminan masyarakat yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut sebagai upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan kesehatan daerah yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan. Namun demikian derajat kesehatan di Kabupaten Tanah Laut masih terhitung rendah dibandingkan dengan kabupaten lain. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kualitas kesehatan penduduk terutama pada penduduk miskin yang antara lain ditunjukkan dengan masih relatif tingginya angka kematian ibu maternal, kematian bayi, masih relatif tingginya angka kesakitan akibat beberapa penyakit menular serta kecenderungan semakin meningkatnya penyakit tidak menular, masih kurang optimalnya kualitas kesehatan serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi dan

mutu tenaga kesehatan dan belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan untuk penduduk miskin.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan setiap Unit Kerja Perangkat Daerah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu tuntutan masa depan dimana tantangan yang mengarah kepada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang baik ( *Good Governance* ), maka perlu menyusun Perencanaan strategis sebagai instrumen manajemen publik yang meliputi perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan yang ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJM Daerah ) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 dan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Tanah Laut. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023 ini selanjutnya dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (

Renja ) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Anggaran Dinas Kesehatan setiap tahunnya sejak tahun 2014 sampai dengan 2018.

## **B. Landasan Hukum**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional yang dalam hal ini termasuk pula perencanaan pembangunan di daerah, maka perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mengamanatkan bahwa dalam perencanaan pembangunan di daerah perlu disusun Rencana Strategis Daerah yang dimuat dalam masing-masing Rencana Strategis SKPD. Selain itu dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut juga didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

### C. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Rencana Strategi ( Renstra ) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut 2014 - 2018 disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan peran Dinas Kesehatan dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dan pembangunan kesehatan daerah, meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam kerangka perwujudan *Good and Clean Governance*.

#### 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Rencana Strategis yang merupakan pedoman untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut.



3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan kesehatan daerah.
4. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis sesuai bidang kewenangan Dinas Kesehatan.
5. Tersusunnya program-program pembangunan kesehatan daerah.
6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dalam kurun waktu dan pembiayaan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 – 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I    Pendahuluan;

Bab II   Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

Bab III  Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas kesehatan;

BAB IV  Tujuan dan Sasaran;

BAB V   Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB VI  Rencana Program dan Kegiatan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

Lampiran

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

#### A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berdasar Peraturan Bupati Tanah Laut No. 67 Tahun 2016. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan.
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan.
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan.
  - d. pelaksanaan administrasi dinas.
  - e. pembinaan UPT Dinas.
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat terdiri dari.
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset.
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari.
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
  - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
  - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
  - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
4. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional.
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
  - c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
  - b. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
6. UPT Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsinya Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

**1. Sekretariat**

- a. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan

program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas;
  - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kesehatan;
  - c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Kesehatan;
  - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
  - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
  - i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

- b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan Pengelolaan Aset.

- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

## 2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesehatan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang kesehatan masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,



pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi dari :

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait promosi dan pemberdayaan masyarakat.

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi dari:

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi.

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait surveilans dan imunisasi.

- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

#### 4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pelayanan kesehatan.
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan

- termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi dari :

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional.

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional.

- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan rujukan.

- c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan



kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan pembiayaan dan jaminan kesehatan.

#### 5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang sumber daya kesehatan.
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan pkrt serta sumber daya manusia kesehatan.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi dari :

- a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kefarmasian dan alat kesehatan.

- b. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fasilitas pelayanan kesehatan.

- c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait sumber daya kesehatan.

#### 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

## B. Sumber Daya Dinas kesehatan

Gambaran mengenai situasi sumber daya kesehatan dikelompokkan menjadi Sarana Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan seperti pada uraian berikut :

### 1. SARANA KESEHATAN

#### a. Puskesmas

**Tabel 2.1**  
**JUMLAH PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS**  
**KELILING MENURUT KECAMATAN / PUSKESMAS**  
**TAHUN 2016**

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PUSTU	PUSLING/ AMBULANCE
1	PANYIPATAN	PANYIPATAN	2	2
		BATAKAN	2	2
2	JORONG	JORONG	2	2
		ASAM - ASAM	5	2
3	BATU AMPAR	TAJAU PECAH	7	2
4	KINTAP	KINTAP	3	2
		SEI CUKA	1	2
5	PELAIHARI	PELAIHARI	8	2
		SEI RIAM	1	2
		ANGSAU	1	2
6	BAJUIN	TANJUNG	4	2
		TIRTA JAYA	2	2
7A	TAKISUNG	TAKISUNG	9	2
8	BATI - BATI	BATI - BATI	3	2
p		KAIT - KAIT	1	2
9	TAMBANG	TAMBANG	2	2
10	KURAU	KURAU	1	2
b		PADANG LUAS	3	2
11	BUMI MAKMUR	BUMI MAKMUR	2	2
11	JUMLAH		59	38

a

dilihat dari rasio Puskesmas per 100.000 penduduk terlihat bahwa rasio Puskesmas terhadap penduduk di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2017 sebesar 5,5 per 100.000 penduduk. Ini berarti pada periode Tahun 2017 setiap 100.000 penduduk rata-rata dilayani oleh kurang lebih 5 unit Puskesmas.

**b. Rumah Sakit**

Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana Rumah Sakit antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dengan jumlah tempat tidur serta rasionya terhadap jumlah penduduk.

Rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk di RSUD H. Boejasin Pelaihari pada Tahun 2017 sebesar 46,7 per 100.000 penduduk.

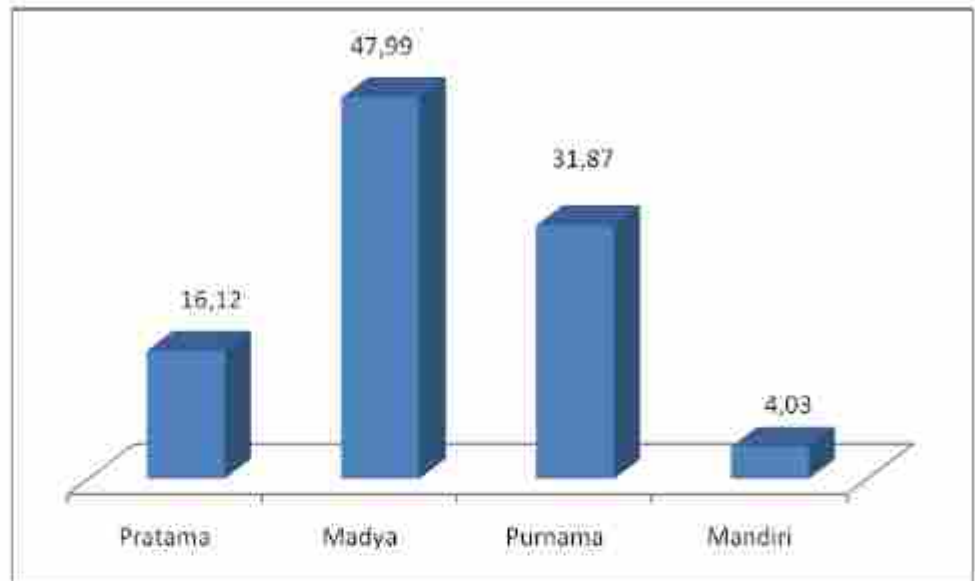
**c. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat ( UKBM )**

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat ( UKBM ) di Kabupaten Tanah Laut antara lain Posyandu, Pos Bersalin Desa (Polindes) dan Desa Siaga.

Pada Tahun 2017 jumlah Pos Bersalin Desa ( Polindes ) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebanyak 113 buah, Posyandu sebanyak 274 buah dan Desa Siaga sebanyak 135 desa. Jadi dengan jumlah desa / kelurahan sebanyak 135, maka telah mencapai 100 persen desa siaga.

Perkembangan Posyandu di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik : 2.1**  
**PERSENTASE POSYANDU MENURUT STRATA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017**



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Posyandu dengan strata Purnama sebesar 31,87% sedangkan yang mandiri masih sebesar 4,03%, ini berarti jumlah Posyandu aktif hanya sebesar 35,90%.

## 2. TENAGA KESEHATAN

Informasi tenaga kesehatan diperlukan bagi perencanaan dan pengadaan tenaga serta pengelolaan kepegawaian. Kesulitan dalam memperoleh data ketenagaan yang mutakhir antara lain disebabkan oleh sifat dari data ketenagaan yang selalu berubah dengan cepat dan terus menerus.

Rasio tenaga kesehatan di kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.2**  
**RASIO TENAGA KESEHATAN**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017**

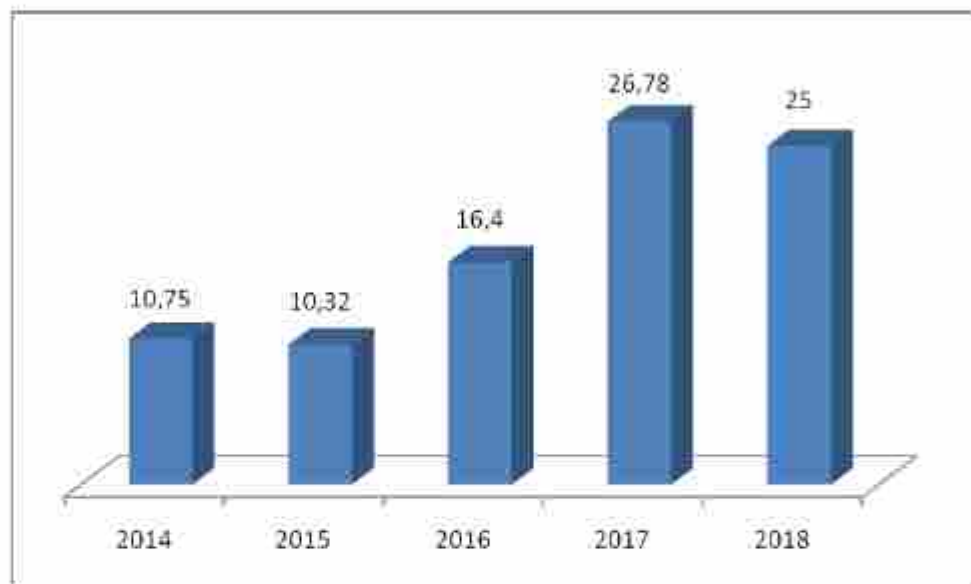
NO	JENIS TENAGA	RASIO	STANDAR
1	Dokter	16,82 per 100.000 pend.	40 per 100.000 pend.
2	Dokter Spesialis	2,9 per 100.000 pend.	6 per 100.000 pend.
3	Dokter Gigi	4,35 per 100.000 pend.	11 per 100.000 pend.
4	Apoteker dan Asisten Apoteker	2,03 per 100.000 pend.	10 per 100.000 penduduk untuk apoteker dan 30 per 100.000 penduduk untuk asisten apoteker.
5	Perawat	96,6 per 100.000 pend.	117,5 per 100.000 pend.
6	Bidan	161,4 per 100.000 pend.	100 per 100.000 pend.
7	Tenaga Gizi	11,3 per 100.000 pend.	22 per 100.000 pend.
8	Tenaga Sanitasi	8,7 per 100.000 pend.	40 per 100.000 pend.
9	Tenaga Kesmas	5,22 per 100.000 pend.	

Dari tabel diatas, terlihat bahwa rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar masih dibawah standar yang diharapkan, sehingga masih diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, yang tentunya melalui analisa kebutuhan tenaga kesehatan.

### 3. PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pembiayaan Dinas kesehatan di Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dana APBD pada periode 2014 -2018 sudah diatas 10% dari anggaran belanja daerah, seperti terlihat pada grafik berikut.

**Grafik : 2.2**  
**PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN PER TAHUN**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT**  
**TAHUN 2011 S.D. 2018**



Pada Tahun 2018 total alokasi anggaran kesehatan pemerintah baik bersumber APBD maupun APBN sebesar Rp. 323.111.352.305,- dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018, dan bila dibandingkan dengan APBD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 sebesar Rp. 1.310.590.612.551,- maka anggaran bidang kesehatan sudah mencapai 25 % sudah melebihi anggaran minimal yang diamanatkan dalam undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan minimal sebesar 10%.

#### C. Kinerja Pelayanan SKPD

Derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi satu sama lain. Status kesehatan masyarakat diukur

melalui angka kesakitan penyakit (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) serta peningkatan umur harapan hidup (*Life Expectancy*). Berbagai upaya yang dilakukan secara terpadu untuk menekan kesakitan pada penyakit tertentu dan kematian pada bayi, balita dan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas.

Pada dasarnya upaya penurunan jumlah bayi lahir mati, jumlah kematian neonatus, jumlah kematian bayi, kematian balita, kematian ibu melahirkan (maternal) dan upaya program / kegiatan kesehatan lainnya terus dilakukan untuk menekan angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi dan Anak sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas kesehatan Tahun 2014 - 2018.

Untuk melihat gambaran derajat kesehatan masyarakat / kinerja pelayanan dan realisasi keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel T-C.23 terlampir.

Untuk Anggaran biaya pembangunan bidang kesehatan serta capaiannya dapat dilihat pada tabel T-C.24 terlampir

- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas kesehatan
- Berdasarkan analisis berbagai aspek dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut maka dapat diidentifikasi factor-faktor Peluang dan tantangan sebagai berikut :

1) Peluang

- a) Undang-Undang RI nomr 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Adanya Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

- c) Adanya Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran
- d) Adanya Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang system Jaminan Sosial Nasional dan terbentuknya Badan Pelaksana Jaminan Sosial tahun 2014.
- e) Kesepakatan para Bupati dan Walikota tanggal 28 Juli 2000 untuk menyediakan alokasi dana kesehatan minimal 15% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau 5% dari Pendapatan Domestik Bruto.
- f) Tersedianya fasilitas Pelayanan kesehatan yang memadai.
- g) Adanya Kelompok Kerja Operasional bidang kesehatan seperti Pokjanal Posyandu.
- h) Adanya sumber dana untuk kesehatan yang berdumber masyarakat melalui program JPKM, Dana Sehat, Dana Sosial Ibu Bersalin, beras perelek/jimpitan, dana kematian dll.
- i) Adanya pertemuan rutin di desa seperti pertemuan mingguan di desa, pengajian/majelis ta'lim.
- j) Adanya Kader kesehatan.
- k) Bertambahnya fasilitas pelayanan / klinik pelayanan kesehatan swasta
- l) Tersedianya peralatan kesehatan dan penunjang kesehatan yang cukup memadai.
- m) Terpenuhinya kebutuhan obat di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.
- n) Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai.
- o) Tersedianya alokasi anggaran yang cukup melalui APBD maupun APBN
- p) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

- q) Adanya partisipasi masyarakat/swasta dalam pembangunan kesehatan.

## 2) Tantangan

- a) Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin.
- b) Pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar masih terbatas
- c) Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh
- d) Masih adanya kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
- e) Meningkatnya Usia harapan hidup mengakibatkan meningkatnya jumlah usia lanjut sehingga menjadi kelompok rentan terhadap masalah kesehatan.
- f) Maraknya makanan jajanan yang mengandung zat berbahaya yang pada akhirnya menimbulkan masalah kesehatan.
- g) Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat masih kurang sehingga bisa menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat
- h) Sistem informasi kesehatan yang masih lemah, keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan

## 3) Kekuatan

- a) Puskesmas sudah melaksanakan perencanaan sendiri (Rencana Kerja Anggaran) sehingga penanganan permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas akan lebih efektif dan efisien.
- b) Hampir semua Kecamatan sudah dibangun Puskesmas, untuk membantu pelayanan di wilayah kerja Puskesmas diperkuat dengan Puskesmas Pembantu, Pusling, Poskesdes/Polindes, Posyandu, dan Usaha Kesehatan Berbasis masyarakat lainnya.

- c) Adanya Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan kesehatan di Puskesmas
- d) Adanya dukungan, kerja sama dan kemitraan lintas program dan lintas sector tingkat kecamatan.
- e) Adanya system informasi manajemen Puskesmas yang bersumber dari system pencatatan dan pelaporan Puskesmas.

#### 4) Kelemahan

- a. Upaya kesehatan masih menitik beratkan pada usaha kuratif dan rehabilitative belum menitik beratkan pada preventif dan promotif.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas kurang berorientasi pada masalah dan kebutuhan kesehatan masyarakat setempat.
- c. Mutu dan penampilan fisik Puskesmas kurang bersih dan nyaman serta disiplin, profesionalisme, keramahan petugas masih lemah.
- d. sumber daya manusia di Puskesmas masih kurang dan tidak merata.
- e. Jumlah kader kesehatan masih kurang dan tingginya drop out kader, kurangnya penghargaan atas kerja kader serta sulitnya mencari kader baru.
- f. Lemahnya koordinasi dengan lintas sektor dan lemahnya Puskesmas dalam menggali dan mengorganisasi partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan sector lain maupun swasta.



### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Angka Kematian ibu di Kabupaten Tanah laut yang pada tahun 2017 mencapai 16 per 100.000 walaupun masih dibawah target target SDGs adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup, tapi hal ini menggambarkan kondisi pelayanan kesehatan yang masih belum maksimal walaupun kontak antara petugas kesehatan dengan ibu hamil sudah tinggi terlihat dengan cakupan K4 pada tahun 2017 mencapai 77,2%.

Angka kematian bayi pada tahun 2017 mencapai 14 per 1.000 kelahiran hidup terlihat masih di atas target SDGs yaitu 12 per 1.000 kelahiran hidup, jadi ini masih merupakan masalah kesehatan di Kabupaten tanah laut. salah satu penyebabnya adalah rendahnya capaian rata-rata Standar Pelayanan Masyarakat bidang kesehatan yaitu sebesar 59,23% untuk itu perlu usaha yang keras dan penggalangan komitmen dalam rangka peningkatan SPM tersebut disamping pembiayaan yang cukup.

Masih adanya Pernikahan dini (Usia Remaja) dimana reproduksi wanita belum siap dan banyaknya remaja hamil diluar nikah bisa juga merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi. Hal ini mengakibatkan remaja menjadi kelompok yang rentan akan suatu penyakit disamping kelompok rentan lainnya seperti usila, keluarga miskin dll.

Kasus gizi buruk tahun 2017 tidak ada bila dibanding tahun 2016 sebanyak 2 orang. Namun hal ini perlu diwaspadai hasil survey pemantauan Gizi masyarakat prevalensi gizi kurang sebesar 6,9% dan bayi yang ditimbang dibawah garis merah sebesar 2,31%.

Penularan infeksi penyalit menular utama (AIDS/HIV, TBC dan Malaria) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Jumlah kasus HIV Tahun 2017 ada 3 orang (target < 5), prevalensi kasus TB tahun 2017 sebesar 115 / 100.000 penduduk (target : 200/100.000), Angka penemuan kasus Malaria tahun 2017 sebesar 0,21/1.000 penduduk (Target 0,5/1.000)

cakupan Universal Child Immunization (UCI) desa tahun 2017 walaupun sudah mencapai 94,7% akan tetapi 5,3% berpotensi timbulnya kasus-kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sehingga dapat menimbulkan wabah, untuk itu perlu upaya-upaya untuk meningkatkan cakupan Imunisasi.

Maraknya makanan jajanan yang mengandung zat berbahaya atau tidak higienis yang pada akhirnya menimbulkan masalah kesehatan, untuk itu perlu kerja keras dalam pengawasan tempat-tempat penjual makanan, dari hasil pengawasan tempat makanan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 hanya 14,72% yang memenuhi persyaratan kesehatan

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat masih kurang sehingga bisa menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat seperti masih tingginya penyakit menular dan masuknya penyakit tidak menular dalam 10 penyakit terbesar di Kabupaten Tanah Laut seperti hipertensi yang merupakan urutan

pertama dari sepuluh penyakit terbanyak di Kabupaten Tanah laut. Untuk itu perlu peningkatan di bidang promotif dan preventif dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Meningkatnya populasi usia lanjut meningkat dan termasuk kelompok yang rentan akan resiko suatu penyakit sehingga perlu perhatian khusus untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan kelompok rentan terhadap resiko penyakit.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah puskesmas, dibentuknya poskesdes dan dijaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin, namun akses terhadap pelayanan kesehatan belum disertai meningkatnya Kualitas mutu pelayanan disebabkan kurangnya SDM, sarana prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai / tidak sesuai standar kesehatan (Permenkes nomor 75 tahun 2014) disamping Sistem informasi kesehatan yang masih lemah, keterbatasan data serta rendahnya kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan serta pengawasan program kegiatan yang berjalan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-B.35

Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Rendahnya Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu masih tinggi	Capaian SPM pelayanan kesehatan keluarga masih rendah Bayi lahir dengan berat badan rendah masih tinggi meningkatnya pernikahan dini.
		Prevalensi gizi kurang / stunting masih ada	Capaian pemantauan gizi masyarakat masih rendah Lemahnya kerja sama Lintas Sektor yang terkait dalam bidang pembangunan kesehatan
		Kurang mandiri masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan.	Capaian Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah Rendahnya capaian desa ODF
		Tingginya prevalensi Penyakit menular dan mulai meningkatnya penyakit tidak menular	Capaian SPM Penyakit menular dan tidak menular masih rendah kualitas kesehatan lingkungan rendah ditandai dengan masih tingginya kasus KLB penyakit menular yang disebabkan lingkungan yang buruk. Pengawasan obat dan makanan serta tempat-tempat umum kurang maksimal. kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyakit masih kurang.
		Kualitas pelayanan di Fasilitas pelayanan Kesehatan belum optimal	Hanya 48% Puskesmas terakreditasi. Indeks Kepuasan masyarakat (3,2) nilai belum maksimal. Terbatasnya SDM yang berkompetensi Fasilitas kesehatan yang belum standar sesuai permenkes 75 tahun 2014. Sistem informasi kesehatan yang masih lemah dan keterbatasan data Rendahnya kualitas penyelenggaraan SAKIP Daerah

**B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut 2019 - 2023 adalah Terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi)

Misi :

**1. Berkarya**

Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya :

- a. Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Berkarya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- c. Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi

**2. Inovasi**

Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif :

- a. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat
- b. Berinovasi untuk melahirkan industri kreatif.

**3. Tertata**

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance):

- a. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
- b. Menerapkan prinsip-prinsip orang yang tepat dan cerdas pada jabatan yang selaras di dalam pemerintahan

4. Religius

meningkatkan kualitas dan kuantitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat:

- a. Religius dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan beragama

5. Sinergi

Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

- a. Membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah pusat, provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Meningkatkan sinergitas dengan pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota

Tujuan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, tentunya sejalan dengan visi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terpilih dan juga sejalan dengan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimana bidang kesehatan juga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan akan mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.



Visi Pemerintah provinsi Kalimantan selatan adalah **Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing.**" Visi tersebut mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada Tahun 2021 berada dalam kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil).

Dengan visi Gubernur tersebut diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mampu mendorong pembangunan berwawasan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan berperilaku sehat serta mampu menggerakkan semua potensi yang ada dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu bagi semua penduduk, guna memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai perwujudan hak asasi manusia di bidang kesehatan.

Dalam pembangunan bidang kesehatan pemerintah provinsi akan **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani** dengan Indikator tercapainya tujuan ini pada tahun 2021 adalah :

- 1) Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH)
- 2) Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)
- 3) Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)
- 4) Seluruh Kabupaten/Kota melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

#### **D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Setiap pembangunan tentu ada dampak negatifnya karena itu perlu perencanaan dan tata ruang dan wilayah seperti yang sudah dilakukan Kabupaten Tanah Laut dengan membuat tata wilayah dengan zona tertentu seperti zona pertanian/perkebunan, zona Industri berat dan ringan dan lain-lain tentunya semua itu dilandasi dengan pengkajian

lingkungan hidup strategis, sehingga diharapkan setiap pembanguna dilandasi tata ruang dan kajian lingkungan hidup dan berwawasan kesehatan sehingga dampak negative dari pembangunan dapat diminimalisir dan khususnya tidak menurunkan derajat kesehatan masyarakat

#### **E. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan permasalahan yang ada maka isu-isu strategis bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

- a) Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu masih tinggi
- b) Penurunan Prevalensi gizi kurang / stunting belum optimal
- c) Kurang mandiri masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan.
- d) Tingginya prevalensi Penyakit menular dan mulai meningkatnya penyakit tidak menular
- e) Kualitas pelayanan di Fasilitas pelayanan Kesehatan belum optimal

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas kesehatan

#### A. Tujuan

Terdapat dua tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019-2023, yaitu: meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Dinas Kesehatan bersifat dampak (*impaci atau outcome*). dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 16 per 100.00 kelahiran hidup menjadi 10 per 100.000 kelahiran hidup.
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 89 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup
3. Menurunkan prevalensi stunting dari 25% menjadi 20%

Sedangkan dalam rangka Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan maka indikator yang akan dicapai adalah:

1. Persentase Keluarga Sehat menjadi 50%
2. Indeks kepuasan masyarakat dari 3,2 menjadi 3,8

## B. Sasaran

Sasaran Strategis Dinas kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah :
  - a. Menurunkan Angka Kematian Ibu sebesar 10 per 100.000 Kelahiran Hidup
  - b. Menurunkan Angka Kematian Bayi sebesar 9,2 per 1000 kelahiran hidup
2. Meningkatnya status gizi masyarakat dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah : Prevalensi stunting 20%
3. Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah : Persentase Rumah Tangga berPHBS sebesar 60%
4. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah :
  - a. Persentase pelayanan orang dengan penyakit DM sebesar 100%
  - b. Persentase pelayanan orang dengan penyakit Hipertensi sebesar 100%
  - c. Persentase Desa mengalami KLB Penyakit Menular 0%
  - d. Cakupan desa UCI sebesar 100%
5. Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah :
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,8
  - b. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama sebesar 53%
  - c. Persentase Pelayanan Kesehatan Public Service Center (PSC) 119 dan on call sebesar 60%
  - d. Cakupan kepesertaan JKN sebesar 100%

- e. Ratio Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) sebesar 0,74 per 10.000 penduduk
- f. Persentase Keluarga Sehat sebesar 50%
- g. Angka Kesembuhan Pasien rawat jalan dan Rawat inap 95%
- h. Kepuasan pelanggan pada Rumah Sakit 85%
- i. Persentase Unit Pelayanan Teknis BLUD sebesar 76%
- j. Nilai LAKIP 74%
- k. Nilai RB 77%

Adapun Tujuan dan sasaran rencana strategis yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel T-C.25 terlampir

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang/stunting pada balita.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, dan disandingkan dengan visi dan misi Bupati Tanah laut dimana Dinas kesehatan berkewajiban dalam misi I yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi)			
MISI I : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Meningkat - nya keselamatan ibu melahirkan dan anak	Optimalisasi Pelayanan kesehatan primer dibangun dengan mengedepankan upaya kesehatan Ibu dan anak, serta untuk mengatasi penyakit- penyakit lain penyebab kematian ibu dan anak.	Penguatan komitmen Lintas Program / Lintas Sektor dalam melaksanakan program kegiatan mengedepankan upaya kesehatan ibu anak dan Keluarga Berencana
			Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan anak melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas.
		Optimalisasi pengembangan sistem surveilans (pengumpulan, pengolahan, analisis dan Interpretasi serta penyebaran data secara sistematis dan berkelanjutan), monitoring dan evaluasi yang memberdayakan peranan masyarakat lokal	memperkuat sistem surveilans kematian ibu anak serta monitoring secara berkelanjutan
	Meningkat-nya status gizi masyarakat	Optimalisasi penanganan gizi buruk Fokus pada penanggulangan KEK (kekurangan energy kronis)	Penanggulangan KEK dan Balita Kurang Gizi memperkuat sistem surveilans kasus gizi buruk, monitoring dan evaluasi serta dilaksanakannya pemetaan status gizi masyarakat

		ibu hamil dan gizi kurang/buruk pada balita.	Memperkuat kelembagaan yang ada dalam pemantauan status gizi masyarakat
Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Optimalisasi kegiatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat		Penguatan Kerjasama Lintas sektor, swasta, LSM yang dapat mendukung pembangunan bidang kesehatan
			peningkatan penyuluhan melalui media penyuluhan secara konvensional dan elektronik/melalui sosial media
			Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Kader Kesehatan, membuat percontohan desa sehat (PHBS)
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	optimalisasi kelompok kesehatan Lingkungan, mendukung Upaya Kesehatan Lingkungan.		Penguatan Kerja sama Lintas Sektor dan Program, swasta, LSM. Pembinaan Kelompok Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga, Peningkatan Pelayanan Kesehatan olah raga seperti tes kebugaran untuk institusi maupun masyarakat, memanfaatkan Media sosial untuk optimalisasi Penyuluhan dan pemberdayaan Upaya Kesehatan Lingkungan
Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah raga	Fasilitasi dan Pembinaan kepada Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan Upaya Kesehatan Kerja Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga secara bertahap terpadu dan berkesinambungan berdasarkan kebutuhan masyarakat.		Mendorong dan memfasilitasi kepada semua Puskesmas untuk melaksanakan pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Kesehatan kerja dan olah raga, Advokasi dan sosialisasi Kesehatan kerja dan olah raga (Pemda, dunia usaha, lintas program, lintas sektor, dll)
Meningkatnya Pengendalian	optimalisasi Promosi		Penguatan Advokasi ke perentu kebijakan untuk meningkatkan

Penyakit Menular dan Tidak menular	pencegahan, dan pengurangan faktor risiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat	pendanaan dan multi sektor, peningkatan kerjasama LS dan Pelaksanaan Bimbingan teknis dan manajemen ke Fasilitas pelayanan Kesehatan Penguatan aktifitas Posbindu PTM
	Optimalisasi pelayanan kesehatan Penyakit tidak menular, serta kolaborasi sektor swasta dan profesional	Peningkatan kapasitas bagi petugas dan kader kesehatan, serta pelaksanaan pemeriksaan PTM melalui kolaborasi swasta dan profesional
	Penguatan surveilans, pengawasan PTM	Meningkatkan Pelaksanaan surveilans faktor risiko PTM yang terintegrasi (melibatkan LS/LSM/Swasta) serta memperkuat aktifitas Posbindu PTM
	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	Mendorong kepada semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
	Perluasan cakupan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan terkait penyakit menular.	Peningkatan skrining cepat bila ada dugaan potensi meningkatnya kejadian penyakit menular seperti Mass Blood Survey untuk malaria
	Intensifikasi penemuan kasus Penyakit Menular/Perluasan skrining dan Deteksi Dini Kasus Penyakit Menular	Perluasan skrining, deteksi dini Penyakit menular dengan sasaran ibu hamil, populasi kunci/ kelompok masyarakat berisiko tinggi
	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit	Peningkatan keterlibatan LS/LP/LSM dan masyarakat dalam upaya penemuan/deteksi dini Penyakit Menular dan melalui surveilans berbasis masyarakat untuk melakukan pengamatan terhadap kejadian penyakit menular
	Optimalisasi Pengendalian	Penyelenggaraan Imunisasi dilaksanakan oleh Puskesmas, swasta

		Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	dan masyarakat, dengan prinsip keterpaduan
			Peningkatan kualitas pelayanan imunisasi melalui; – Petugas yang terampil – Coldchain dan vaksin yang berkualitas – Pemberian imunisasi yang benar
		Optimalisasi Program kesehatan lingkungan	Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan/kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
			Peningkatan cakupan TPM Sehat, TTU Sehat dan RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Primer	peningkatan Pembinaan dan kapasitas Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan primer
			Mendorong Puskesmas agar lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan Kesehatan primer melalui pendekatan keluarga
			Mendorong Puskesmas agar mampu melaksanakan pelayanan pengobatan alternatif melalui pelayanan kesehatan tradisional yang bermutu dan berkualitas
			Mendorong semua Puskesmas dan Rumah Sakit menjadi Puskesmas/Rumah Sakit BLUD
			Meningkatkan Pemerataan pelayanan Kesehatan Primer dengan penambahan 3 Puskesmas Baru
		Optimalisasi pelayanan kesehatan Rujukan:	Peningkatan Pembinaan dan monitoring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta
			Peningkatan Puskesmas Perawatan menjadi Rumah Sakit Pratama, percepatan operasional Rumah sakit baru dan optimalisasi Rumah Sakit yang ada
			Mendorong dan memfasilitasi semua fasilitas Pelayanan Kesehatan agar terakreditasi Madya
			Meningkatkan pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana Bagi Masyarakat (termasuk Pelayanan Kesehatan on Call)
			Memberikan Pelayanan pembiayaan dan jaminan Kesehatan bagi

			masyarakat miskin yang belum masuk keanggotaan BPJS
		Menjamin Fasilitas Pelayanan Kesehatan masyarakat yang merata dan bermutu	Menyediakan dukungan kefarmasian/ obat-obatan/bahan medis habis pakai dan alat kesehatan serta pemeliharaan/kalibrasi alat kesehatan
			Peningkatan Fasilitas Kesehatan dengan Membangun/mengadakan/memperbaiki, meningkatkan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk sarana dan prasarana secara merata dan sesuai standar kesehatan yang berlaku
			Meningkatkan kapasitas dan pemerataan Sumber daya manusia kesehatan
			Menjamin dukungan manajemen dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan Pembangunan bidang Kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dengan indikator Tujuan yang harus dicapai selama lima tahun adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 16 per 100.00 kelahiran hidup menjadi 10 per 100.000 kelahiran hidup.
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 89 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup
3. Menurunkan prevalensi stunting dari 25% menjadi 20%
4. Persentase Keluarga Sehat dari 14% menjadi 50%
5. Indeks kepuasan masyarakat dari 3,2 menjadi 3,8

Untuk mencapai tujuan tersebut Pelayanan Kesehatan Dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanankesehatan dasar secara cepat dan tepat, diharapkan sebagian besar masalah kesehatan dapat diatasi.

Program pelayanan dasar tersebut adalah :

1. Promosi Kesehatan
2. Kesehatan Lingkungan
3. Pencegahan Pemberantasan Penyakit
4. Kesehatan keluarga dan Reproduksi
5. Perbaikan Gizi Masyarakat
6. Penyembuhan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan



Disamping program diatas Dinas kesehatan dalam melaksanakan pembangunan bidang kesehatan yang teknisnya dilaksanakan oleh UPT Dinas kesehatan juga melaksanakan program pelayanan pengembangan seperti Upaya kesehatan gigi masyarakat, Kesehatan tradisional, Kesehatan mata dan lain-lain sesuai dengan permasalahan yang ada di tiap wilayah kerja UPT masing masing, tentunya kesemua program diatas adalah yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Program kesehatan dasar maupun pengembangan menjadi penting karena antara satu program dengan program yang lain mempunyai keterkaitan dan saling mendukung dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah di bidang kesehatan. Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada table T-C.27 terlampir

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1  
**Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode (2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	AKI per 100.000 Kelahiran Hidup	15,7	15	14	13	11	10	10
2	AKB per 1000 kelahiran hidup	13,98	10	9,8	9,6	9,4	9,2	9,2
3	Prevalensi Gizi stunting	25%	24%	23%	22%	21%	20%	20%
4	Persentase Rumah Tangga berPHBS	34%	40%	40%	45%	50%	60%	60%
5	Persentase pelayanan orang dengan penyakit Tidak Menular (Hipertensi dan DM)	41%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Desa mengalami KLB Penyakit Menular	13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Cakupan desa UCI	94,10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Indeks kepuasan masyarakat	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8

9	Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	5%	11%	16%	26%	37%	53%	53%
10	Persentase Pelayanan Kesehatan Public Service Center (PSC) 119 dan on call	0%	20%	30%	50%	55%	60%	60%
11	Cakupan kepesertaan JKN	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Ratio Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) per 10.000 penduduk	0,60	0,63	0,66	0,68	0,71	0,74	0,74
13	<i>Persentase Keluarga Sehat</i>	14%	20%	25%	30%	40%	50%	50%
14	Angka Kesembuhan Pasien rawat jalan Rawat inap	85%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
15	Kepuasan pelanggan pada Rumah Sakit	82%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
16	Persentase Unit Pelayanan Teknis BLUD	5%	5%	25%	44%	64%	76%	76%
17	Nilai LAKIP	69%	70%	71%	72%	73%	74%	74%

## BAB VIII PENUTUP

Dengan Ridho dan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2019-2023 dapat disusun untuk menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut yang semakin kompleks dan berlangsung cepat.

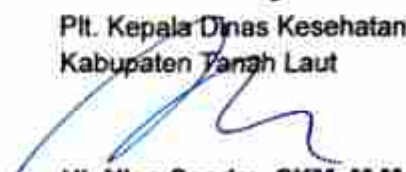
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut 2019-2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sehingga hasil pencapaiannya terukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan kinerja tahunan Dinas kesehatan.

Mengingat perubahan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini dapat dilakukan kajian dan revisi seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Rencana strategis ini dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya bila dilaksanakan dengan kerja keras dengan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta dengan partisipasi masyarakat yang tinggi.

Pelaihari, 22 April 2019

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut



**Hj. Nina Sandra, SKM, M.M.**  
**NIP 196407101985112023**

Tabel T-0.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut

No.	Indikator Kinerja dan Fungsi yang terdapat di bawah	Target 2016	Target 2017	Target Indikator Kinerja	Target Kinerja Peningkatan Kinerja Tahun					Prestasi Capaian Tahun					Kinerja Capaian Pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Umur Harapan Hidup		70		69	69.9	69.9	69.78	70	69.11	69.29	69.0	69.78	69.99	100.0	99.9	99.9	99.9	99.9
2	Angka Harapan Hidup 100.000 kelahiran hidup		100		100	111	100.0	110	100	10.42	144	99.0	19.1	10	79.7	100.0	91.7	14.0	10.0
3	Angka Harapan Hidup 100.000 kelahiran hidup		7.0		9.0	9	10.0	10	7.0	12.89	10	14.0	10.99	10.0	100.0	144.4	140.0	109.0	144.0
4	Prevalensi Diabet		10		10.99	11.0	10.9	10.9	10	10.99	10.0	10.0	9.9	0.0	99.9	100.0	100.0	99.9	10.0
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar SD dan 0-6 tahun	100			100	100	100	100	100	99.99	99	97.91	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
6	Cakupan pelayanan kesehatan dasar	100			100	100	100	100	100	99.9	97.9	94.1	94.1	100.0	99.9	97.9	94.1	94.1	94.1
7	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	70%			49	92	92	92	70	97.00	49	99.09	99.9	99	100.0	99.9	100.0	99.9	99.7
8	Cakupan dasar yang melaksanakan sanitasi Total (toilet, air minum, limbah)	49.9			19	11.0	10%	40	49.9	19	11.0	9.1%	19.7	99	100.0	100.0	100.0	99.9	110.7
9	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien	100			79	100	100	100	100	99.99	100	100	70.7	71.9	99.9	100.0	100.0	70.7	71.9
10	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
11	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat (Gd) yang terakreditasi secara kesehatan di kabupaten	100%			70	100	100	100	100	99	100	100	100	100	71.9	100.0	100.0	100.0	100.0
12	Persentase kemajuan Rali (program pembangunan rumah kesehatan)	100%			10	92	90	79	100	9	90	90	90	100	99.0	109.7	100.0	99.7	100.0
13	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	91			17	19	92	19	91	19.97	19.97	99	99.9	99	99.1	99.0	99.0	94.9	100.7
14	Persentase Saluran Pembuangan Sampah Bersih (SPB) di kabupaten	99%			90	90	70	79	99	99.91	97.9	77.97	99.94		100.0	100.0	100.0	99.9	0.0
15	Coverage air bersih	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	99.7	99.7	100.0	100.0	100.0	99.7	99.7
16	Persentase rumah tangga yang telah menggunakan air bersih (RTH)	70			14	49	91	91	70	99.94	49.99	44.9	40.4	49.97	100.0	100.0	99.9	99.9	99.9
17	Persentase pemenuhan kebutuhan gizi		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
18	Persentase Puskesmas yang memiliki 2 kamar mandi		99		49	90	90	90	99	99.9	99.9	99	99.9	99	99.9	77.9	104.0	91.9	104.9
19	Persentase dasar pelayanan yang melaksanakan kegiatan Peningkatan		92		0	0	0	19	90	0	0	94.9	99.9	79.99	0.0	0.0	1099.0	971.7	294.0
20	Indeks Kesehatan		4		9.0	9.4	9.9	9.9	4	9.1	9.1	9.0	9.1	9.4	99.9	91.0	99.1	91.9	99.9

No	Indikator Kinerja dan Fungsi Program/kegiatan daerah	Target 2016	Target 2017	Target indikator tahunnya	Target Realisasi Program/kegiatan daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Tercapainya Pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Saluran pemukiman perumahan di Nalintas Jember			50	50	50	10.0	75	50		51.5	54.3	50.9	54.8	5.0	54.8	100.0	100.0	100.0
2	Perumahan Pabrikas yang merupakan pemukiman status perumahan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3	Perumahan Pabrikas yang merupakan pemukiman status perumahan			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	11.8	57.0	57.0	50.0	54.0	40.0/0.0
4	Saluran pemukiman perumahan di Nalintas DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat)			50	50	50	10	50	50	0	0	0	11.0	11.8	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
5	Perumahan Pabrikas yang merupakan pemukiman status perumahan			100	100	100	100	100	100				57.17	50	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
6	Saluran pemukiman perumahan di Nalintas DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat)			50	50	50	10	50	50				74.08	50	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0
7	Perumahan Pabrikas yang merupakan pemukiman status perumahan			100	100	100		100	100				50	50.0				50.0	50.0
8	Saluran pemukiman perumahan di Nalintas DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat)			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
9	Perumahan Pabrikas yang merupakan pemukiman status perumahan			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
10	Saluran pemukiman perumahan di Nalintas DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat)			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
11	Perumahan Pabrikas yang merupakan pemukiman status perumahan			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
12	Saluran pemukiman perumahan di Nalintas DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat)			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
13	Perumahan Pabrikas yang merupakan pemukiman status perumahan			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
14	Saluran pemukiman perumahan di Nalintas DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat)			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
15	Perumahan Pabrikas yang merupakan pemukiman status perumahan			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
16	Saluran pemukiman perumahan di Nalintas DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat)			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
17	Perumahan Pabrikas yang merupakan pemukiman status perumahan			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
18	Saluran pemukiman perumahan di Nalintas DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat)			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
19	Perumahan Pabrikas yang merupakan pemukiman status perumahan			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
20	Saluran pemukiman perumahan di Nalintas DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat)			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
21	Perumahan Pabrikas yang merupakan pemukiman status perumahan			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
22	Saluran pemukiman perumahan di Nalintas DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat)			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
23	Perumahan Pabrikas yang merupakan pemukiman status perumahan			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
24	Saluran pemukiman perumahan di Nalintas DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat)			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
25	Perumahan Pabrikas yang merupakan pemukiman status perumahan			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
26	Saluran pemukiman perumahan di Nalintas DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat)			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
27	Perumahan Pabrikas yang merupakan pemukiman status perumahan			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0
28	Saluran pemukiman perumahan di Nalintas DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat) DOK (Dopo Zakat)			100	100	100		100	100				50.0	57.0				50.0	57.0













[illegible]



[illegible]





[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]





4	Pergerakan investasi disamping dari perusahaan lain yang masuk	226.202.000,00	226.202.000,00	9.173.000,00	1.127.200.000	10.402.000	4.073.000,00	207.000.000,00	226.202.000	314.717.000	-	66,70	66,68	66,68	66,68	6,00	279.400.000	182.333.333
5	Program Penelitian (Sistem dan Perbaikan)					1.000.000					-					0,00	10.000.000	-
6	Perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan mesin					10.000.000					-					0,00	10.000.000	-
7	Perbaikan dan lain-lain					1.000.000					-					0,00	1.000.000	-
8	Perbaikan barang habis-habis yang rusak					1.000.000					-					0,00	1.000.000	-
9	Perbaikan gedung dan perlengkapan kantor					10.000.000					-					0,00	10.000.000	-
10	Perbaikan peralatan umum lainnya					1.000.000					-					0,00	1.000.000	-
11	Perbaikan peralatan dan perlengkapan					1.000.000					-					0,00	1.000.000	-
12	Program Penelitian (Sistem dan Perbaikan)					1.000.000					-					0,00	1.000.000	-
13	Perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan mesin					1.000.000					-					0,00	1.000.000	-
14	Perbaikan dan lain-lain					1.000.000					-					0,00	1.000.000	-
15	Perbaikan barang habis-habis yang rusak					1.000.000					-					0,00	1.000.000	-
16	Perbaikan gedung dan perlengkapan kantor					10.000.000					-					0,00	10.000.000	-
17	Perbaikan peralatan umum lainnya					1.000.000					-					0,00	1.000.000	-
18	Perbaikan peralatan dan perlengkapan					1.000.000					-					0,00	1.000.000	-
Total: Total Perbaikan		17.200.000	17.200.000	10.173.000	10.173.000	10.402.000	10.402.000	10.402.000	10.402.000	10.402.000	10.402.000	66,70	66,68	66,68	66,68	6,00	10.402.000	10.402.000
19	Program Penelitian (Sistem dan Perbaikan)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	66,70	66,68	66,68	66,68	6,00	10.000.000	10.000.000
20	Perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan mesin	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	66,70	66,68	66,68	66,68	6,00	10.000.000	10.000.000
21	Perbaikan dan lain-lain	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	66,70	66,68	66,68	66,68	6,00	10.000.000	10.000.000
22	Perbaikan barang habis-habis yang rusak	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	66,70	66,68	66,68	66,68	6,00	10.000.000	10.000.000
23	Perbaikan gedung dan perlengkapan kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	66,70	66,68	66,68	66,68	6,00	10.000.000	10.000.000
24	Perbaikan peralatan umum lainnya	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	66,70	66,68	66,68	66,68	6,00	10.000.000	10.000.000
25	Perbaikan peralatan dan perlengkapan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	66,70	66,68	66,68	66,68	6,00	10.000.000	10.000.000
26	Program Penelitian (Sistem dan Perbaikan)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	66,70	66,68	66,68	66,68	6,00	10.000.000	10.000.000



[illegible]

[illegible]

1	Personenverkehr (einschließlich Eisenbahn)							8.277.209.000	275.200.000							8.552.409.000	58.400.000						28.00	1.000.000.000	9.552.409.000
2	Personenverkehr (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							2.728.200.000	18.100.000							2.746.300.000	36.200.000						18.00	800.000.000	2.826.500.000
3	Personenverkehr (einschließlich Flugverkehr)							107.870.000	100.000.000							207.870.000	200.000.000						20.00	100.000.000	307.870.000
4	Personenverkehr (einschließlich Seeverkehr)							22.070.000	19.200.000							41.270.000	38.400.000						10.00	50.000.000	91.270.000
5	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr)							10.000.000.000	5.000.000.000							15.000.000.000	10.000.000.000						10.00	10.000.000.000	25.000.000.000
6	Personenverkehr (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000	100.000.000							200.000.000	200.000.000						10.00	100.000.000	300.000.000
7	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr)							100.000.000	100.000.000							200.000.000	200.000.000						10.00	100.000.000	300.000.000
8	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr)							100.000.000	100.000.000							200.000.000	200.000.000						10.00	100.000.000	300.000.000
9	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr)							100.000.000	100.000.000							200.000.000	200.000.000						10.00	100.000.000	300.000.000
10	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
11	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
12	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
13	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
14	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
15	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
16	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
17	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
18	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
19	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
20	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
21	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
22	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
23	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
24	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
25	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
26	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
27	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
28	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
29	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
30	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
31	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
32	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
33	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
34	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
35	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
36	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
37	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
38	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
39	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
40	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
41	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
42	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
43	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
44	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
45	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
46	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
47	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
48	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
49	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
50	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
51	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
52	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
53	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)							100.000.000.000	5.000.000.000							105.000.000.000	5.000.000.000						10.00	10.000.000.000	110.000.000.000
54	Personenverkehr (einschließlich Luftverkehr) (einschließlich der betriebsförmigen Massen-Verkehrsmittel)																								



PERBAIKAN TABEL RENSTRA SESUAI HASIL REVIEW INSPEKTORAT

T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas kesehatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target					Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan status kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	15	14	13	11	10	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	80%	85%	90%	95%	100%
		Angka kematian bayi per 1000 Kelahiran hidup	10	9,8	9,6	9,4	9,2		2. Persentase Ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	80%	85%	90%	95%	100%
		Prevalensi Gizi stunting	24%	23%	22%	21%	20%		3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	90%	91%	93%	98%	100%
									4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	88%	90%	92%	95%	100%
								Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat						
									1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	40%	40%	45%	50%	60%
									2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	100%	100%	100%	100%
								Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1. Persentase desa STBM	52,3%	53,80%	69,3%	84,6%	100%
									2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	80%	80%	80%	80%
									3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	70%	70%	70%	70%
								Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	100%
								Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
									2. Persentase Desa bebas KIE- Penyakit Menular	100%	100%	100%	100%	100%
									3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target					Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Indeks kepuasan masyarakat	81.5	82.9	84.4	85.9	88.31	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	21%	37%	47%	58%	68%
		2. Indeks Keluarga Sehat	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8		2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	0%	100%	100%	100%	100%
									3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	4,7%	18%	100%	100%	100%
								4. Persentase Desa dengan IK3 kategori Sehat	20%	25%	30%	40%	50%	
								5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa	41%	44%	48%	52%	58%	
								6. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	38%	100%	100%	100%	100%	
								Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar	60%	65%	70%	75%	80%
									2. Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan yang standar	84%	89%	95%	100%	100%
									3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	85%	87%	90%	92%	100%
									1. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%
								Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100	100	100	100	100
									2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target					Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023
									3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100	100	100	100	100
									4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100	100	100	100	100
									5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100	100	100	100	100
									6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	70	71	72	73	74
									7. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	73	74	75	76	77

Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI: Terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi)			
MISI I: Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	Optimalisasi Pelayanan kesehatan primer dibangun dengan mengedepankan upaya kesehatan ibu dan anak, serta untuk mengatasi penyakit-penyakit lain penyebab kematian ibu dan anak.	Penguatan komitmen Lintas Program / Lintas Sektor dalam melaksanakan program kegiatan mengedepankan upaya kesehatan ibu anak dan Keluarga Berencana
		Optimalisasi pengembangan sistem surveilans (pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi serta penyebaran data secara sistematis dan berkelanjutan), monitoring dan evaluasi yang memberdayakan peranan masyarakat lokal	Peningkatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas
		Optimalisasi penanganan gizi buruk Fokus pada penanggulangan KEK (kekurangan energy kronis) ibu hamil dan gizi kurang/buruk pada balita	memperkuat sistem surveilans kematian ibu anak serta monitoring secara berkelanjutan
			Penanggulangan KEK dan Balita Kurang Gizi
			memperkuat sistem surveilans kasus gizi buruk, monitoring dan evaluasi serta dilaksanakannya pemetaan status gizi masyarakat
Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Optimalisasi kegiatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Memperkuat kelembagaan yang ada dalam pemantauan status gizi masyarakat	
			Penguatan Kerjasama Lintas sektor, swasta, LSM yang dapat mendukung pembangunan bidang kesehatan
			peningkatan penyuluhan melalui media penyuluhan secara konvensional dan elektronik/melalui sosial media
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	Optimalisasi Program kesehatan lingkungan		Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Kader Kesehatan, membuat percontohan desa sehat (PHBS)
			Penguatan Kerja sama Lintas Sektor dan Program, swasta, LSM, Pembinaan Kelompok Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga, Peningkatan Pelayanan Kesehatan olah raga seperti tes kebugaran untuk institusi maupun masyarakat, memanfaatkan Media sosial untuk optimalisasi Penyuluhan dan pemberdayaan Upaya Kesehatan Lingkungan
			Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan/kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah raga	Fasilitasi dan Pambinaan kepada Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan Upaya Kesehatan Kerja Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga secara bertahap terpadu dan berkesinambungan berdasarkan kebutuhan masyarakat.		Peningkatan cakupan TPM Sehat, TTU Sehat dan RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar
			Mendorong dan memfasilitasi kepada semua Puskesmas untuk melaksanakan pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK). Pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Kesehatan kerja dan olah raga, Advokasi dan sosialisasi Kesehatan kerja dan olah raga (Pemda, dunia usaha, lintas program, lintas sektor, dll)



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Optimalisasi Promosi pencegahan, dan pengurangan faktor risiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat	Penguatan Advokasi ke penentu kebijakan untuk meningkatkan pendanaan dan multi sektor, peningkatan kerjasama LS dan Pelaksanaan Bimbingan teknis dan manajemen ke Fasilitas pelayanan Kesehatan
			penguatan aktifitas Posbindu PTM
		Optimalisasi pelayanan kesehatan Penyakit tidak menular, serta kolaborasi sektor swasta dan profesional	Peningkatan kapasitas bagi petugas dan kader kesehatan, serta pelaksanaan pemeriksaan PTM melalui kolaborasi swasta dan profesional
		Penguatan surveilans, pengawasan PTM	Meningkatkan Pelaksanaan surveilans faktor risiko PTM yang terintegrasi (melibatkan LS/LSM/Swasta) serta memperkuat aktifitas Posbindu PTM
		Perluasan cakupan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan terkait penyakit menular	Peningkatan skrining cepat bila ada dugaan potensi meningkatnya kejadian penyakit menular seperti Mass Blood Survey untuk malaria
		Intensifikasi penemuan kasus Penyakit Menular/Perluasan skrining dan Deteksi Dini Kasus Penyakit Menular	Perluasan skrining, deteksi dini Penyakit menular dengan sasaran ibu hamil, populasi kunci/ kelompok masyarakat berisiko tinggi
		Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit	Peningkatan keterlibatan LS/LP/LSM dan masyarakat dalam upaya penemuan/deteksi dini Penyakit Menular dan melalui surveilans berbasis masyarakat untuk melakukan pengamatan terhadap kejadian penyakit menular
		Optimalisasi Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	Penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan oleh Puskesmas, swasta dan masyarakat, dengan prinsip keterpaduan
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Primer	Peningkatan kualitas pelayanan imunisasi melalui: – Petugas yang terampil – Coldchain dan vaksin yang berkualitas – Pemberian imunisasi yang benar
			Peningkatan pembinaan dan kapasitas Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan primer
			Mendorong Puskesmas agar lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan Kesehatan primer melalui pendekatan keluarga
		Optimalisasi pelayanan kesehatan Rujukan	Mendorong Puskesmas agar mampu melaksanakan pelayanan pengobatan alternatif melalui pelayanan kesehatan tradisional yang bermutu dan berkualitas
			Peningkatan Pembinaan dan monitoring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta
			Mendorong dan memfasilitasi semua fasilitas Pelayanan Kesehatan agar terakreditasi Madya Meningkatkan pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana Bagi Masyarakat (termasuk Pelayanan Kesehatan on Call)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Memberikan Pelayanan pembiayaan dan jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum masuk keanggotaan BPJS
	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Menjamin Fasilitas Pelayanan Kesehatan masyarakat yang merata dan bermutu	Menyediakan dukungan kefarmasian/ obat-obatan/bahan medis habis pakai dan alat kesehatan serta pemeliharaan/kalibrasi alat kesehatan
			Peningkatan Fasilitas Kesehatan dengan Membangun/mengadakan/memperbaiki, meningkatkan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk sarana dan prasarana secara merata dan sesuai standar kesehatan yang berlaku
			Meningkatkan kapasitas dan pemerataan Sumber daya manusia kesehatan
	Meningkatnya Administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	Menjamin meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran dan dukungan operasional perkantoran	Menjamin dukungan manajemen dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan

Tabel 11.10  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut

Tipe	Sasaran	Tipe 1 2	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Duk kontrol dan kegiatan (Duk KPI)	Data Dasar Rata-rata Rata-rata Pendanaan (Rp)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Rencana Biaya pada Tahun Periode Rencana Perangko secara		Unit Biaya Perangko dalam Rencana Angka Rp	Lokasi
						Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	Tanggal	Rp				
			Dinas Kesehatan				148.871.004.348		209.008.000.000		227.470.400.000		344.747.800.000		271.470.400.000		1.085.741.407.188				
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat	1	Program Penegakan dan Peningkatan Perilaku Taman Bersih	Persentase pelaksanaan yang dengan perilaku Taman Bersih		100%	127.417.800									100%	127.417.800				
			Schering, tidak ada penyakit dan infeksi	Jumlah kasus dari A/P/II dan DII, III, dan IV		12.800 orang	127.417.800									12.800 orang	127.417.800				
		2	Program Jamban Sehat	Persentase pelaksanaan jamban		100%	18.000.000.000									100%	18.000.000.000				
	Meningkatkan mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan		Jumlah kesehatan masyarakat di kabupaten dan kota	Jumlah pelaksanaan		18.000 orang	18.000.000.000									18.000 orang	18.000.000.000				
		3	Program Standar Pelayanan Kesehatan	Persentase objek dan SPMF yang sesuai Perencanaan Kesehatan		80%	2.000.000.000	80%	130.870.000	80%	138.170.000	80%	148.680.000	100%	188.140.000	100%	2.708.180.000				
			Pengadaan dan Pelayanan Kesehatan	Jumlah pelayanan dan kesehatan		2.000	2.000.000.000									2.000	2.708.180.000				
			Pelayanan, meliputi pelayanan pelayanan kesehatan	Jumlah objek pelayanan kesehatan		18 pelayanan x	180.000.000	18 pelayanan x	131.870.000	18 pelayanan x	138.170.000	18 pelayanan x	148.680.000	18 pelayanan x	188.140.000	18 pelayanan x	2.708.180.000				
Meningkatkan mutu pelayanan dan keadilan		4	Program Biaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Data dengan RIS (Rencana Sehat)		1%	21.000.000.000	1%	208.500.000	40	208.500.000	40	208.500.000	40	208.500.000	40	208.500.000	90%	21.732.440.000		
			Pengelolaan kesehatan pelayanan dan kesehatan dan SDM RIS	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tanggung Jawab dan Kesehatan		180 orang	207.800.000									180 orang	207.800.000				
			Pelayanan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah pelayanan dan kesehatan masyarakat		180 orang	40.240.712.000									180 orang	40.240.712.000				
			Pengelolaan kesehatan pelayanan kesehatan dan produk	Jumlah Pelayanan yang maksudnya program kesehatan dan produk		18 pelayanan x	27.000.000									18 pelayanan x	27.000.000				
			Pengelolaan kesehatan pelayanan kesehatan dan produk	Jumlah pelayanan kesehatan yang dimaksud dengan kesehatan dan produk		1.000 orang	28.000.000									1.000 orang	28.000.000				
			Pelayanan kesehatan dan produk	Jumlah pelayanan kesehatan yang dimaksud dengan kesehatan dan produk		8.000	2.180.000.000									8.000	2.180.000.000				
			Pelayanan kesehatan dan produk	Jumlah pelayanan kesehatan yang dimaksud dengan kesehatan dan produk		8.000	800.000.000									8.000	800.000.000				
			Pelayanan kesehatan dan produk	Jumlah pelayanan kesehatan yang dimaksud dengan kesehatan dan produk		18 pelayanan x	4.071.000.000									18 pelayanan x	4.071.000.000				
			Pengelolaan kesehatan pelayanan kesehatan dan produk	Jumlah Pelayanan yang maksudnya kesehatan dan produk		18 pelayanan x	28.000.000									18 pelayanan x	28.000.000				
			Pengelolaan kesehatan pelayanan kesehatan dan produk	Jumlah pelayanan kesehatan yang dimaksud dengan kesehatan dan produk		20 orang	28.047.792									20 orang	28.047.792				
			Pengelolaan kesehatan dan pelayanan kesehatan	Jumlah Pelayanan yang maksudnya program pelayanan kesehatan		18 pelayanan x	28.000.000									18 pelayanan x	28.000.000				
			Pengelolaan kesehatan dan pelayanan kesehatan	Jumlah pelayanan kesehatan yang dimaksud dengan kesehatan dan produk		18.000 orang	48.000.000									18.000 orang	48.000.000				
			Pengelolaan kesehatan dan pelayanan kesehatan	Jumlah pelayanan kesehatan yang dimaksud dengan kesehatan dan produk		18 pelayanan x	128.000.000									18 pelayanan x	128.000.000				
			Pengelolaan kesehatan dan pelayanan kesehatan	Jumlah pelayanan kesehatan yang dimaksud dengan kesehatan dan produk		27 orang	200.000.792									27 orang	200.000.792				

[illegible]





Tahun	Sektor	Sub- S	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama Sektor, Program dan Kegiatan (KUP)	Data Dapen Rata-rata tahun Rata-rata Pencapaian (2015)	2016		2017		2018		2019		2020		Rencana Kinerja pada 4000 Pokoknya Rencana Peningkatan Daerah		Link Kase Peningkatan daerah Peningkatan Kase	Lokasi
						Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	11	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0 dokumen	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen keadilan Pelayanan	12	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	13	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	14	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	15	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	16	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	17	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	18	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	19	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	20	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	21	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	22	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	23	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	24	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	25	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	26	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	27	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	28	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	29	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	30	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	31	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	32	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	33	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	34	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	35	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	36	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	37	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	38	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	39	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	40	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	41	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	42	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	43	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	44	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	45	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	46	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	47	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	48	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	49	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	50	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	51	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	52	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	53	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	54	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	55	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		
	Manajemen mutu pelayanan dan keadilan Pelayanan	56	Program Peningkatan Pelayanan Daerah	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		100%	51.000.000									100%	51.000.000		
			Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan	Pelayanan pelayanan keadilan pelayanan		0	51.000.000									0 dokumen	51.000.000		

[illegible]





Tahun	Daerah	Sub-DA	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Sub-program, dan Kegiatan (Sub-PA)	Data Tahun Awal Pelaksanaan (2018)	2018		2019		2020		2021		2022		Visual Kinerja pada 4000 Peta Desa Peringkat dasar		Link Data Peringkat dasar Perangguas	Lokasi
						Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp		
				Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten / Kecamatan Tahunan 2020-2025															
			Perencanaan Inisiatif, kebijakan, dan SPDRP PDR 2020	Jumlah orang Perencanaan Inisiatif, kebijakan dan SPDRP PDR 2020 yang dihasilkan			90	107.818.900	100	107.818.900	100	240.108.900	100	134.108.900	100	1.982.888.940			Rajabasa
		6	Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Kabupaten dan Kecamatan			100.000	76.400.000.000	100.000	44.900.700.000	100.000	90.000.000.000	100.000	100.000.000.000	100.000	100.000.000.000			JAB
			1. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			2. Evaluasi dan Pengembangan																
			3. Pembinaan dan Pengembangan																
			4. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			5. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			6. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			7. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			8. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			9. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			10. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			11. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			12. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			13. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			14. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			15. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			16. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			17. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			18. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			19. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			20. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			21. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			22. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			23. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			24. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			25. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			26. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			27. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			28. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			29. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			30. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			31. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			32. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			33. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			34. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			35. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			36. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			37. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			38. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			39. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			40. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			41. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			42. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			43. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			44. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			45. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			46. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			47. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			48. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			49. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			50. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			51. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			52. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			53. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			54. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			55. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			56. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			57. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			58. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			59. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			60. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			61. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			62. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			63. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			64. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			65. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			66. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			67. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			68. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			69. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			70. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			71. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			72. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			73. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			74. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			75. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			76. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			77. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			78. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			79. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			80. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			81. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			82. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			83. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			84. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			85. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			86. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			87. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			88. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			89. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			90. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			91. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			92. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			93. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			94. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			95. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			96. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			97. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			98. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			99. Pelaksanaan dan Evaluasi																
			100. Pelaksanaan dan Evaluasi																



Tahun	Daerah	Sub- D	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sub-program, dan Kegiatan (KPI)	Data Tahun Revisi tahun awal Perencanaan (2012)	2014		2015		2016		2017		2018		Visual Kinerja pada 4000 Pokok Rencana Perangai dasar		Lainnya Kategori Perangai dalam Perencanaan 2012	Lokasi
						Tertinggi	Rp	Tertinggi	Rp	Tertinggi	Rp	Tertinggi	Rp	Tertinggi	Rp	Tertinggi	Rp		
	Meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas Pelayanan Kesehatan	01	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	UAKP	10%	70%		70%	388.210.000	70%	387.500.000	70%	304.870.000	74%	232.270.000	74%	1.201.150.000		
				Perentase Pencapaian dari Kategori Kinerja sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Perentase Pencapaian dari Misi (KPI)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		02	Perencanaan perencanaan dan kinerja SDG	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat Musi (KPI)			1	30.000.000	1	31.000.000	1	33.070.000	1	33.710.750	1	338.000.750		Perangai	
		03	Perencanaan laporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan yang dibuat Musi (KPI)			1	127.820.000	1	120.810.000	1	129.110.100	1	127.900.100	1	700.890.100		Perangai	
		04	Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan yang dibuat Musi (KPI)			1	36.100.000	1	71.000.000	1	61.100.000	1	30.800.000	1	318.000.000		Perangai	
	Meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas Pelayanan Kesehatan	05	Program Pengembangan Informasi Pembangunan dan Kinerja SDG	Indeks Kualitas Masyarakat	77	81,2		82,2	30.000.000	83,4	30.000.000	83,9	30.000.000	84,1	30.000.000	84,1	179.000.000		
			Perentase Pencapaian dari Kategori Kinerja sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan			1	30.000.000	1	31.000.000	1	30.000.000	1	31.000.000	1	310.000.000			
			Perentase Pencapaian dari Misi (KPI)	Jumlah dokumen informasi yang dibuat (Musi)			1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000			
	Meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas Pelayanan Kesehatan	06	Program Pembiayaan dan Pengembangan Jasa	Perentase Rata-rata Tingkat dan P400	40%	40%		40%		40%		40%		40%		40%			
			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sub-program, dan Kegiatan (KPI)	Jumlah Rata-rata Tingkat	77	77		77		77		77		77		77			
	Meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas Pelayanan Kesehatan	07	Program pengendalian, pengendalian, dan evaluasi kinerja rumah sakit	Indeks Kualitas Masyarakat															
			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sub-program, dan Kegiatan (KPI)	Jumlah Rata-rata Tingkat															
			Perentase Pencapaian dari Kategori Kinerja sesuai standar	Jumlah Rata-rata Tingkat															
		08	Program pengendalian, pengendalian, dan evaluasi kinerja rumah sakit	Jumlah Rata-rata Tingkat															
		09	Program pengendalian, pengendalian, dan evaluasi kinerja rumah sakit	Jumlah Rata-rata Tingkat															
	Meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas Pelayanan Kesehatan	10	Program Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Masyarakat	77,3											30.070.000			
			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sub-program, dan Kegiatan (KPI)	Jumlah dokumen informasi yang dibuat (Musi)															
		11	Program Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen informasi yang dibuat (Musi)															
		12	Program Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen informasi yang dibuat (Musi)															
		13	Program Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen informasi yang dibuat (Musi)															
		14	Program Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen informasi yang dibuat (Musi)															
		15	Program Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen informasi yang dibuat (Musi)															
		16	Program Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen informasi yang dibuat (Musi)															
		17	Program Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen informasi yang dibuat (Musi)															
		18	Program Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen informasi yang dibuat (Musi)															
		19	Program Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen informasi yang dibuat (Musi)															
		20	Program Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen informasi yang dibuat (Musi)															

Tajuk	Isi	Sub-Isi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Output, dan Kegiatan (KUR)	Data Capaian Pada tahun Awal Pelaksanaan (2018)	2018		2019		2020		2021		2022		Mendakui Kinerja pada 4000 Pokoknya Rendah Peningkatan Kinerja	Tingkat Kinerja Peningkatan Rendahnya Peningkatan Kinerja	Lokasi
						Tertinggi	Rendah	Tertinggi	Rendah	Tertinggi	Rendah	Tertinggi	Rendah	Tertinggi	Rendah			

Tabel T-C.28  
Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Kat.	NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Kat.
			2019	2020	2021	2022	2023						2019	2020	2021	2022	2023		
1	Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	15,7	15	14	13	11	10	10	(KU)	1	Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	78%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	
2	Angka kematian bayi per 1000 Kelahiran hidup	13,98	10	9,8	9,6	9,4	9,2	9,2	(KU)	2	Persentase Ibu Bersalin yang dilayani sesuai Standar	79%	80%	82%	90%	95%	100%	100%	
3	Prevalensi Gizi stunting	25%	24%	23%	22%	21%	20%	0,2	(KU)	3	Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	88%	90%	92%	95%	98%	100%	100%	
										4	Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	96%	98%	90%	92%	95%	100%	100%	
										5	Persentase Rumah Tangga berPHBS	40,99%	40%	40%	45%	50%	60%	60%	
										6	Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
										7	Persentase desa STBM	28,15%	31,3%	51,8%	69,2%	84,6%	100%	100%	
										8	Persentase TTV yang memenuhi syarat Kesehatan	75	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
										9	Persentase TPM yang memenuhi syarat Kesehatan	31	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
										10	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
										11	Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
										12	Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
										13	Persentase Desa Universal Child Immunisation (UCI)	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Indeks kepuasan masyarakat	77	81,5	82,9	84,4	85,9	88,31	88,31	(KU)	14	Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	11%	21%	37%	47%	58%	58%	68%	
5	Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	(KU)	15	Persentase Pelayanan Hewanat daturatan oleh Public Service Center (PSC)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
										16	Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	4,7%	4,7%	18%	100%	100%	100%	100%	
										17	Persentase Desa dengan IKK Kategori Sehat	9%	20%	25%	30%	40%	50%	50%	
										18	Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Terpadu Obat Keluarga (Aman TIGA) di Desa	37%	41%	44%	48%	52%	56%	56%	

NO	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket	NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023						2019	2020	2021	2022	2023		
										19	Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	9%	38%	100%	100%	100%	100%	100%	
										20	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar	55%	60%	66%	70%	75%	80%	80%	
										21	Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	73%	84%	89%	96%	100%	100%	100%	
										22	Persentase obat dan SifitP yang sesuai Formularium Nasional	83%	85%	87%	90%	92%	100%	100%	
										23	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
										24	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
										25	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
										26	Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
										27	Persentase Pemasangan dan Pelaporan Rancangan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
										28	Persentase Pemasangan aset sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
										29	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	69	70	71	72	73	74	74	
										30	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	71	73	74	75	76	77	77	

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Rendahnya Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu masih tinggi	Capaian SPM pelayanan kesehatan keluarga masih rendah
			Bayi lahir dengan berat badan rendah masih tinggi
			meningkatnya pernikahan dini,
		Penurunan Prevalensi gizi kurang / stunting belum optimal	Capaian pemantauan gizi masyarakat masih rendah
			Lemahnya kerja sama Lintas Sektor yang terkait dalam bidang pembangunan kesehatan
		Kurang mandiri masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan.	Capaian Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah
			Rendahnya capaian desa ODF
		Tingginya prevalensi Penyakit menular dan mulai meningkatnya penyakit tidak menular	Capaian SPM Penyakit menular dan tidak menular masih rendah
			kualitas kesehatan lingkungan rendah ditandai dengan masih tingginya kasus KLB penyakit menular yang disebabkan lingkungan yang buruk.
			Pengawasan obat dan makanan serta tempat-tempat umum kurang maksimal.
			kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyakit masih kurang.
		Kualitas pelayanan di Fasilitas pelayanan Kesehatan belum optimal	Hanya 48% Puskesmas terkorelasi.
			Indeks Kepuasan masyarakat (3,1) nilai belum maksimal.
			Terbatasnya SDM yang berkompetensi
			Fasilitas kesehatan yang belum standar sesuai permenkes 75 tahun 2014.
			Sistem informasi kesehatan yang masih lemah dan keterbatasan data
			Rendahnya kualitas penyelenggaraan SAKIP Daerah



Tabel T.17  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut

Tahun	Sektor	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sektor, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Diklat Pembelajaran dan Pembinaan (2015)	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana Pembangunan daerah	Link Data Perangko daerah Peninggung/akad	Jumlah
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
			Dinas Kesehatan				148.871.154.349		208.000.000.000		227.470.410.000		244.747.890.000		270.490.400.000		1.000.741.489.182									
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Keterampilan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	Program Peningkatan dan Penguatan Pelayanan Tindakan Medis	Persentase pelayanan yang dengan persentase Tindakan Medis (Tindakan Medis)	100%		127.427.800											100%		127.427.800						
			Screening darah untuk penyakit darah merah	Jumlah orang yang mendapat pelayanan Darah Merah (Darah Merah) (Darah Merah) (Darah Merah)	100%	127.427.800												100%		127.427.800						
		2	Program Jambore	Persentase kegiatan jambore	100%		18.000.000.000											100%		18.000.000.000						
			Jambore kesehatan masyarakat di kabupaten/kota/kabupaten	Jumlah peserta jambore	100%	18.000.000.000												100%		18.000.000.000						
		3	Program Kader Kesehatan Masyarakat	Persentase kader dan staf yang sesuai formulir kesehatan	80%		2.124.400.000	80%	180.000.000	80%	180.000.000	80%	180.000.000	80%	180.000.000	80%	180.000.000	80%	180.000.000	80%	180.000.000	80%	180.000.000	80%	180.000.000	
			Pengadaan dan pelatihan kader kesehatan	Jumlah kader kesehatan yang sesuai formulir kesehatan	100%	2.124.400.000												100%		2.124.400.000						
			Pembinaan, pelatihan dan peningkatan kader kesehatan	Jumlah kader kesehatan yang sesuai formulir kesehatan	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000		
		4	Program Pengembangan Kesehatan Masyarakat	Persentase kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat	100%		21.228.040.000	100%	218.000.000	100%	218.000.000	100%	218.000.000	100%	218.000.000	100%	218.000.000	100%	218.000.000	100%	218.000.000	100%	218.000.000	100%	218.000.000	
			Pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat	100%	218.000.000												100%		218.000.000						
			Pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat	100%	218.000.000												100%		218.000.000						

[illegible]





Tipe	Desain	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Daplat Pemerintah Awal Perencanaan (2018)	2018		2019		2020		2021		2022		Target Kinerja pada Akhir Periode Rencana Pembangunan Daerah		Link Data Perangko daerah Perangko/Program	Jumlah
						Tarip	Rp	Tarip	Rp	Tarip	Rp	Tarip	Rp	Tarip	Rp	Tarip	Rp		
			Pengadaan rumah sakit umum sakit	Jumlah jasa kesehatan		5	270.000.000									5	270.000.000		
			Pengadaan pelayanan rumah sakit umum sakit jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa	Jumlah jasa pelayanan rumah sakit jiwa		5	600.700.000									5	600.700.000		
			Pengadaan pelayanan rumah sakit jiwa	Jumlah jasa pelayanan rumah sakit jiwa		2	700.000.000									2	700.000.000		
			Pengadaan pelayanan rumah sakit jiwa	Jumlah jasa pelayanan rumah sakit jiwa		10	270.000.000									10	270.000.000		
Mitra			Program Rancangan Pelayanan Kesehatan Kesehatan	Persentase daerah kesehatan masyarakat kesehatan Kesehatan		100%	41.920.800									100%	41.920.800		
			Pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat	Jumlah jasa pelayanan dan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat		20 orang	41.920.800									20 orang	41.920.800		
			10 Program Rancangan Pelayanan Kesehatan Lintas Layanan	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Lintas Layanan		80%	88.000.000									80%	88.000.000		
			Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat	Jumlah Pelayanan jiwa masyarakat kesehatan jiwa Layanan		18 Jumlahnya	88.000.000									18 Jumlahnya	88.000.000		
			15 Program Rancangan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase pelayanan Kesehatan anak Balita, Pelayanan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Layanan Anak Kesehatan Balita per 1000 kelahiran hidup		100%	100.180.000									100%	100.180.000		
			Pengadaan																
Meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas pelayanan kesehatan			10 Program Rancangan Kesehatan jiwa dan kesehatan masyarakat jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa	Persentase pelayanan jiwa dan kesehatan masyarakat jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa		80%	880.000.000	80%	880.000.000	80%	880.000.000	80%	880.000.000	80%	880.000.000	80%	880.000.000		
			15 Peningkatan mutu, jumlah pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan masyarakat jiwa	Jumlah jasa pelayanan jiwa dan kesehatan masyarakat jiwa		141	270.000.000	141	270.000.000	141	270.000.000	141	270.000.000	141	270.000.000	141	270.000.000		
Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dan etika			17 Program Rancangan Kesehatan jiwa dan kesehatan masyarakat jiwa	AKB per 100.000 kelahiran hidup		10	348.780.000									10	348.780.000		
				AKB per 1000 kelahiran hidup		10.00	35									10	35		
			Pengadaan pelayanan jiwa dan kesehatan jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa	Jumlah jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa		5.075 sakit	348.780.000									5.075 sakit	348.780.000		
				Jumlah jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa		7.000 jasa										7.000 jasa			
			Pengadaan mutu pelayanan rumah sakit jiwa	Jumlah Pelayanan jiwa rumah sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa		11 jasa	87.000.000									11 jasa	87.000.000		
Meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas pelayanan			10 Program Rancangan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan jiwa dan kesehatan masyarakat jiwa	AKB Lahir		80%	84.870.800									80%	84.870.800		
			Pelayanan jiwa dan kesehatan masyarakat jiwa	Jumlah jiwa jiwa dan kesehatan masyarakat jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa		2 sakit	11.000.000									2 sakit	11.000.000		
			Pelayanan jiwa dan kesehatan masyarakat jiwa	Jumlah jiwa jiwa dan kesehatan masyarakat jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa		1 sakit	12.000.000									1 sakit	12.000.000		
			Pelayanan jiwa dan kesehatan masyarakat jiwa	Jumlah jiwa jiwa dan kesehatan masyarakat jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa		1 sakit	12.800.000									1 sakit	12.800.000		
				Jumlah jiwa jiwa dan kesehatan masyarakat jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa sakit jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa		1 sakit	13.780.000									1 sakit	13.780.000		



[illegible]



Tahun	Desain	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Diklat Pemerintah Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangko daerah		Link Data Perangko daerah Perangko.go.id	Jenis
						Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp		
				AKB per 1.000 kelahiran hidup	93,3	93		93		93		93		93		93			
				Persentase Stunting	23,4%	24%		23%		23%		23%		23%		23%		2,3 % 77%	
				Persentase Runtan Tangga berisiko	40,3%	40%		40%		40%		40%		40%		40%			
				Persentase data STBM	24,1%	22,4%		19,3%		22,4%		24,9%		100%		100%			
	Ukungan daerah masarakat		Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kecamatan keluarga dan Sis Masyarakat	Jumlah: Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			8.885		681.981.000	8.813		8.873		285.111.440	8.709	845.823.824	8700	2.194.220.224	kega
				Jumlah: Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin			8.885		8.813		8.873		8.709		8700				kega
				Jumlah: Pelayanan Kesehatan Balita			20.300		17.349		17.600		18.100		16800				kega
				Jumlah: Sistem gizi rumah (masyarakat dan rumah masyarakat) Masyarakat Terdampak dan terancam		1,11		1,11		1,11		1,00		1,11		1,00			kega
	Ukungan daerah masarakat		Pembinaan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah: Jemaah haji kota Promosi Kesehatan			33		288.108.100	33		33		1.172.882.874	33	1.176.882.841	33	4.134.207.188	Promosi
				Jumlah: Rumah Tangga berisiko			3.900		3.200		3.600		3.800		3.900				Promosi
				Jumlah: Pelayanan Kesehatan pada Usia Disabilitas			116.128		116.128		116.128		116.128		116.128		116.128		Promosi
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Gizi Masyarakat	Jumlah: Pengawasan masyarakat			1.011		317.990.800	1.011		1.011		275.970.000	1.011	500.480.478	1.000	1.008.170.121	KUINDP
				Jumlah: data STBM			128		128		128		128		128		128		KUINDP
				Jumlah: Puluhan yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Kerja dan Gizi Masyarakat		12	20.112.000		12		12		12		12		12		KUINDP
		16	2. Kegiatan yang dibutuhkan pelayanan lingkungan	Jumlah: Pengawasan Kualitas lingkungan rumah Masyarakat			12.000		900.000.000		900.000.000		600.000.000		900.000.000		2.320.000.000		
	Ukungan daerah masarakat	20	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan	Persentase Pelayanan yang terjangkau Jemaah	24	10%		24%	90.700.112.000	24%	90.770.000.000	24%	28.000.000.000	24%	100.000.000.000	24%	271.700.000.000		
				Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat oleh Public Service Center (PSC)	2%	10%		20%		10%		10%		10%		10%			
				Persentase penduduk muda yang memiliki gastrokardi	2%	10%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indeks Kelangkaan Sehat	2%	0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4			
				Indeks Kesehatan Masyarakat	2,2	2,4		2,5		2,4		2,7		2,8		2,8			
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Jumlah: Jemaah haji kota pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kehidupan	14.111		14.111		1.112.781.871	14.441		14.441		1.000.000.000	14.717	1.042.000.000	14.747	10.817.011.001	Promosi
				Jumlah: Pelayanan Kesehatan Tangga Kesehatan dan Jaminan Kesehatan		7		8		8		10		10		10			Promosi

Tipe	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Diklat Pembelahan Awal Pembelahan (2020)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Penganggaran		Link Data Penganggaran desain Penganggaran	Jumlah
						Tujuan	Rp	Tujuan	Rp	Tujuan	Rp	Tujuan	Rp	Tujuan	Rp				
			Pembinaan, Penguatan, dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi Utama			8	800.000.000	8	1.100.000.000	7	750.000.000	11	825.000.000	10	9.575.000.000		Rujukan	
				Jumlah Dokumen Rencana Pengawasan Pelaksanaan Pemantauan Kinerja Manajerial RSUD Bantul			1		1			1							
			Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan SPKOT PDS 100	Jumlah orang Peningkatan Kapasitas Kesehatan dan Public Service Center (PSC) 100 termasuk pelayanan SPK			80	827.645.400	100	827.645.400	100	800.400.000	100	800.400.000	100	1.332.385.840		Rujukan	
		10	Pembinaan, Penguatan, dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas UH			181.125	76.501.600.000	181.125	82.982.750.000	181.125	81.000.000.000	181.125	101.999.827.500	181.125	154.128.900.800		100	
		10	1. Peningkatan pelayanan Medis dan Non Medis																
		10	2. Peningkatan standar pelayanan kesehatan	Jumlah akreditasi pelayanan kesehatan			45 ka	300.000.000	45 ka	300.000.000	45 ka	300.000.000	45 ka	298.000.000	45 ka	1.391.000.000			
		10	3. Kemitraan dengan lembaga kesehatan masyarakat	Jumlah kerjasama PAK bersama lembaga kesehatan masyarakat			1 ksa	80.000.000	1 ksa	80.000.000	1 ksa	100.000.000	1 ksa	118.780.000	1 ksa	417.890.000			
Meningkatkan Penguatan Penyelenggaraan Program Kesehatan Masyarakat		10	Program Pencegahan, Pengendalian dan Peningkatan Penyakit	Output Data UCI		81,1%	100%	100%	811.888.800	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	2.000.000.000		
				persentase data/ kelengkapan data/ RLE Penyakit Menular		10%	10%	10%		10%		10%		10%					
				Persentase pelayanan orang dengan penyakit Tifus Menular (Mipertam dan Dili)		10%	100%	100%		100%		100%		100%					
			Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan rekam medis	Jumlah data UCI		10%	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.014.000.000		Mutasi	
				Jumlah data UCI yang diunggah		10%	10		10		10		10		10				
			Peningkatan, pengembangan dan Penguatan Penyelenggaraan Program Kesehatan Masyarakat	Jumlah program kesehatan penyakit menular langsung (Prorotam, dan TB, HIV,)		0,180	300.000.000	0,180	300.000.000	0,180	300.000.000	0,180	300.000.000	0,180	300.000.000	0,180	1.000.000.000		100
				Jumlah Program Pencegahan penyakit Tular (Tul) dan Mipertam		0,180	300.000.000	0,180	300.000.000	0,180	300.000.000	0,180	300.000.000	0,180	300.000.000	0,180	1.000.000.000		100
			Peningkatan dan Penguatan Penyelenggaraan Program Kesehatan Masyarakat	Jumlah data UCI SPKOT PDS 100 (PDS 100, dan SPKOT)		12,000	300.000.000	12.000	300.000.000	12.000	300.000.000	12.000	300.000.000	12.000	300.000.000	12.000	1.000.000.000		100
Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Kualitas Fasilitas Kesehatan		10	Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Meningkatkan dan Abol Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan)	Indeks Kepuasan Masyarakat		8,1	10	11.000.000.000	8,1	11.000.000.000	8,1	11.000.000.000	8,1	11.000.000.000	8,1	11.000.000.000			



[illegible]

Tipe	Sektor	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Digital Nasional (2020)	2020		2021		2022		2023		2024		Target Kinerja pada Akhir Periode Rencana Strategis daerah		Link Data Perangko daerah (Perangko/Link)	Jenis
						Tujuan	Rp	Tujuan	Rp	Tujuan	Rp	Tujuan	Rp	Tujuan	Rp	Tujuan	Rp		
		15	Pemutaran laporan tahunan	Jumlah dokumen pelaporan yang sesuai standar			187.889.228	1	187.889.228	1	187.889.228	1	187.889.228	1	187.889.228	1	187.889.228		Form
		16	Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan yang sesuai standar			86.142.000	1	71.938.000	1	82.181.600	1	10.897.000	1	10.897.000	1	10.897.000		Form
Korupsi	Masyarakat sipil, pelayanan dan keadilan, pelayanan	22	Program Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kinerja SPPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	13	14	85.875.887	13	85.875.887	13	85.875.887	13	85.875.887	13	85.875.887	13	85.875.887		
			Pelayanan Kegiatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat			10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
			Pelayanan Sistem Informasi SPPD	Jumlah data informasi yang diinput/diupdate			10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
Korupsi	Pelayanan Masyarakat, Pelayanan, Pelayanan	23	Program Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kinerja SPPD	Persentase Rumah Tangga Berdaya	40%	40%		40%		40%		40%		40%		40%			
			Pelayanan Kegiatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat				10		10		10		10		10			
Korupsi	Masyarakat sipil, pelayanan dan keadilan, pelayanan	40	Program pemberdayaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Angka Kesembuhan Pasien Rawat Inap Rawat Inap			35%		35%		35%		35%		35%				
			Pelayanan Kegiatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat															
Korupsi	Masyarakat sipil, pelayanan dan keadilan, pelayanan	41	Program pemberdayaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit Pelayanan Masyarakat															
			Pelayanan Kegiatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat															
Korupsi	Masyarakat sipil, pelayanan dan keadilan, pelayanan	42	Program pemberdayaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit Pelayanan Masyarakat	80%												80.870.000		
			Pelayanan Kegiatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat															
Korupsi	Masyarakat sipil, pelayanan dan keadilan, pelayanan	43	Program pemberdayaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit Pelayanan Masyarakat															
			Pelayanan Kegiatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat															
Korupsi	Masyarakat sipil, pelayanan dan keadilan, pelayanan	44	Program pemberdayaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit Pelayanan Masyarakat	80%	80%	104.000.000	80%	104.000.000	80%	104.000.000	80%	104.000.000	80%	104.000.000	80%	104.000.000		
			Pelayanan Kegiatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat															
Korupsi	Masyarakat sipil, pelayanan dan keadilan, pelayanan	45	Program pemberdayaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit Pelayanan Masyarakat			1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000		
			Pelayanan Kegiatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat															
Korupsi	Masyarakat sipil, pelayanan dan keadilan, pelayanan	46	Program pemberdayaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit Pelayanan Masyarakat			1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000		
			Pelayanan Kegiatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat															